

Pengembangan Pariwisata dan Tingkat Pengangguran Terbuka: Bukti Empiris dari Sepuluh Destinasi Pariwisata Nasional Indonesia

Qorinul Huda¹, Muhammad Gozali Yahya², Setiawan Ariansyah³, Ervan Nur Rahmat⁴

BPS Provinsi Lampung¹

BPS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur²

BPS Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan³

BPS Provinsi Kepulauan Riau⁴

*Email qorinulhudaofficial12@gmail.com; gozaliyahya@bps.go.id; setiawan.ariansyah@bps.go.id;
ervan.nur@bps.go.id

Diterima: 20-07-2026 | Disetujui: 27-07-2026 | Diterbitkan: 29-07-2026

ABSTRACT

Tourism is a strategic sector expected to stimulate economic growth while reducing unemployment. However, its benefits have not been evenly distributed among local communities surrounding tourist destinations. This study examines the effect of tourism development on the Open Unemployment Rate (OUR) across ten National Tourism Destinations in Indonesia. The study employs panel data for the 2020–2023 period obtained from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis applies a Fixed Effects Model (FEM) estimated using the Feasible Generalized Least Squares–Seemingly Unrelated Regression (FGLS-SUR) approach. The results reveal that the number of guests and room occupancy rates in star-rated hotels have a significant negative effect on the Open Unemployment Rate, whereas the number of guests and room occupancy rates in non-star hotels, along with the proportion of government expenditure on tourism, have significant positive effects. These findings suggest that tourism development has not yet generated inclusive employment opportunities, particularly in the informal tourism sector and in the effectiveness of public spending. Therefore, tourism policies should prioritize greater local community participation, workforce capacity development, and more effective public expenditure to maximize employment creation.

Keywords: *Tourism Development, Open Unemployment Rate, National Tourism Destinations, Fixed Effect Model*

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi pengangguran. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengembangan pariwisata terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada sepuluh Destinasi Pariwisata Nasional di Indonesia. Penelitian menggunakan data panel tahun 2020–2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis dilakukan menggunakan Fixed Effects Model (FEM) dengan estimasi FGLS-SUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tamu hotel bintang dan tingkat penghunian kamar hotel bintang berpengaruh negatif terhadap TPT, sedangkan jumlah tamu hotel nonbintang, tingkat penghunian kamar hotel nonbintang, dan proporsi pengeluaran pemerintah pada sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap TPT. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata belum sepenuhnya menciptakan kesempatan kerja yang inklusif, terutama pada sektor informal dan pengelolaan belanja pemerintah yang belum optimal. Oleh karena

itu, kebijakan pengembangan pariwisata perlu diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, penguatan kualitas tenaga kerja, serta peningkatan efektivitas belanja pemerintah agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap penurunan pengangguran.

Kata kunci: Pengembangan Pariwisata, Tingkat Pengangguran Terbuka, Destinasi Pariwisata Nasional, *Fixed Effect Model*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Huda, Q., Yahya, M. G. ., Ariansyah, S. ., & Rahmat , E. N. . (2026). Pengembangan Pariwisata dan Tingkat Pengangguran Terbuka: Bukti Empiris dari Sepuluh Destinasi Pariwisata Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3017-3027. <https://doi.org/10.63822/9r357825>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi utama di banyak negara berkembang dengan kontribusi signifikan terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto (World Tourism Organization, 2019). Pertumbuhan sektor ini seringkali dipromosikan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan karena kemampuannya menghasilkan devisa dan mendiversifikasi sumber perekonomian suatu negara (Sharpley, 2002). Karakteristik inilah yang membuat pariwisata tidak hanya berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam perbaikan kesejahteraan. Hal inilah yang semestinya dimanfaatkan, khususnya untuk daerah-daerah dengan potensi wisata yang tinggi tetapi masih tertinggal secara pembangunan.

Indonesia saat ini secara aktif memanfaatkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menetapkan strategi pengembangan pariwisata sebagai bagian integral dari program transformasi ekonomi, dengan fokus pada peningkatan daya saing destinasi wisata dan penguatan rantai nilai ekonomi kreatif. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penetapan 10 Destinasi Pariwisata Nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yaitu danau toba (Sumatera Utara), kawasan borobudur (Jawa Tengah), Lombok – Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Manado – Likupang (Sulawesi Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Raja Ampat (Papua Barat), Bromo – Tengger – Semeru (Jawa Timur), Bangka Belitung, dan Morotai Maluku Utara (Kemenparekraf/Baparekraf, 2020). Program ini bertujuan tidak hanya untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, tetapi juga untuk dimaksudkan untuk pemeratakan manfaat ekonomi pariwisata secara lebih merata ke berbagai daerah.

Sayangnya, manfaat pariwisata seringkali belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar, khususnya pada aspek sosial. Meskipun pariwisata dapat meningkatkan perekonomian, akan tetapi partisipasi masyarakat lokal di sekitar objek wisata masih minim. Kondisi ini justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena masyarakat merasa tidak dilibatkan. Alih-alih menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan, perkembangan pariwisata malah bisa menimbulkan masalah sosial baru.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak sosial pariwisata seringkali kompleks dan tidak merata. Menurut penelitian Yang (2011), meskipun terdapat temuan bahwa pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja baru, kesempatan ini seringkali tidak diakses secara merata oleh masyarakat lokal. Studi lain oleh Higgins-Desbiolles (2020) menemukan bahwa pembangunan pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat justru dapat memperlebar kesenjangan sosial dan mengancam keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri.

Pemahaman mengenai dampak sosial, khususnya mengenai penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar objek pariwisata, menjadi sangat krusial untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Sayangnya, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai dampak sosial dari sektor pariwisata, khususnya pada periode waktu setelah penentuan 10 Destinasi Pariwisata Nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai dampak dari pariwisata terhadap kondisi ketenagakerjaan di 10 lokasi destinasi pariwisata nasional tersebut.

METODE

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap tenaga kerja karena sifatnya yang padat karya dan melibatkan berbagai sektor lain. Menurut Suwena dan Widyaatmaja (2017), industri pariwisata memiliki efek multiplikasi (*multiplier effect*) yang kuat terhadap perekonomian lokal, karena mampu menciptakan lapangan kerja secara langsung dalam sektor inti seperti perhotelan, transportasi, agen perjalanan, dan atraksi wisata. efek tidak langsung juga tercipta melalui peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa lokal seperti makanan, kerajinan tangan, dan layanan lainnya.

Lebih lanjut, pembangunan sektor pariwisata dapat mendorong tumbuhnya kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan. Sinclair dan Stabler (1997) menyatakan bahwa pariwisata memberikan kesempatan kerja yang luas, termasuk bagi kelompok yang sering kali tersingkir dari pasar kerja formal seperti perempuan dan masyarakat pedesaan. Di banyak negara berkembang, pengembangan destinasi wisata menjadi strategi alternatif yang efektif dalam mengurangi pengangguran karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dalam pariwisata jumlah hotel dan tingkat hunian kamar hotel seringkali dianggap representasi langsung dari aktivitas pariwisata. Menurut Middleton dan Clarke (2001), data perhotelan lebih merepresentasikan kunjungan wisatawan yang bermalam (*overnight stays*), dibandingkan indikator lain seperti kunjungan ke objek wisata yang dapat mencakup wisatawan lokal harian (*day-trippers*). Menurut Fletcher et al (2017) Hotel dapat menjadi elemen kunci dalam menarik wisatawan. Jumlah hotel mencerminkan kesiapan destinasi dalam menyediakan tempat tinggal sementara bagi wisatawan. Menurut Travallae et al. (2014), tingkat hunian hotel merupakan indikator yang sensitif terhadap fluktuasi jumlah wisatawan. Ketika tingkat hunian meningkat, hal ini mencerminkan adanya peningkatan kunjungan wisatawan. Menurut teori ekonomi regional (Thorne, 2025), peningkatan jumlah unit usaha di suatu daerah akan menciptakan permintaan tenaga kerja lokal, yang secara langsung menurunkan tingkat pengangguran. Holloway dan Humpreys (2012) mengatakan Tingkat penghunian hotel (*occupancy rate*) yang tinggi menandakan bahwa permintaan akomodasi stabil atau meningkat. Hal ini mendorong hotel untuk mempertahankan atau bahkan menambah jumlah karyawan agar dapat memberikan layanan optimal kepada tamu. Sebaliknya, tingkat penghunian yang rendah dapat menyebabkan pemotongan tenaga kerja karena penghematan biaya. Dengan kata lain, pengelolaan tingkat penghunian yang optimal dapat memberikan stabilitas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran musiman, terutama di daerah wisata yang sangat terpengaruh oleh fluktuasi musim kunjungan wisatawan.

Perkembangan pariwisata di suatu daerah tidak lepas dari peran pemerintahnya. Holloway dan Humpreys (2012) menjelaskan Peran pemerintah dalam pariwisata sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan sektor ini sebagai sumber penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Pemerintah tidak hanya berperan dalam perencanaan, fasilitasi, dan pengawasan pembangunan fasilitas pariwisata seperti hotel, tetapi juga memberikan dukungan finansial dan pelatihan tenaga kerja melalui program pendidikan kepariwisataan. Dengan adanya intervensi pemerintah yang terarah, ketersediaan fasilitas yang memadai dan tenaga kerja terampil dapat terpenuhi, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan tingkat penghunian hotel. Hal ini secara langsung berdampak pada penurunan pengangguran, khususnya di daerah yang bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi utama.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Dengan jumlah unit *cross-section* (N) sebanyak sepuluh provinsi destinasi wisata prioritas. Periode amatan (T) yang digunakan selama lima tahun yaitu 2020-2023. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kemudian, rincian variabel yang digunakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Variabel penelitian

Variabel	Data	Satuan	Sumber
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	BPS
HB	Hotel Bintang	Ribu Orang	BPS
HNB	Hotel Non Bintang dan akomodasi lainnya	Ribu Orang	BPS
TPK_B	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang	Persen	BPS
TPK_NB	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non-Bintang	Persen	BPS
PPP	Proporsi Pengeluaran Sektor pariwisata	Persen	DJPk diolah

Metode Regresi Data panel

Metode data panel merupakan pendekatan kuantitatif yang menggabungkan data lintas individu (*cross-section*) dan data runtut waktu (*time series*), sehingga mampu menangkap dinamika perilaku antarunit individu sepanjang waktu. Selain itu, model ini dapat mengontrol heterogenitas individu yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*), yang tidak dapat ditangkap oleh model *time series* atau *cross-section* secara terpisah (Baltagi, 2005; Wooldridge, 2010).

Pengaruh variabel pariwisata terhadap Tingkat pengangguran terbuka di 10 destinasi provinsi prioritas digunakan analisis regresi data panel dengan persamaan umum sebagai berikut :

$$TPT_{it} = \alpha + \beta X_{it} + u_{it} \quad (1)$$

Dengan TPT merupakan Tingkat pengangguran terbuka, X_{it} merupakan variabel independent yang terdiri atas HB, HNB, TPK_B, TPK_NB, PPP, dan u_{it} merupakan error term.

1. Pemilihan model terbaik

Pemilihan model terbaik digunakan uji statistic Chow, Uji hausmann, dan Uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier (BP – LM) (Porter & Gujarati, 2008).

- Uji statistic Chow untuk memilih antara metode CEM atau FEM dengan melihat efek individu pada suku error nya.

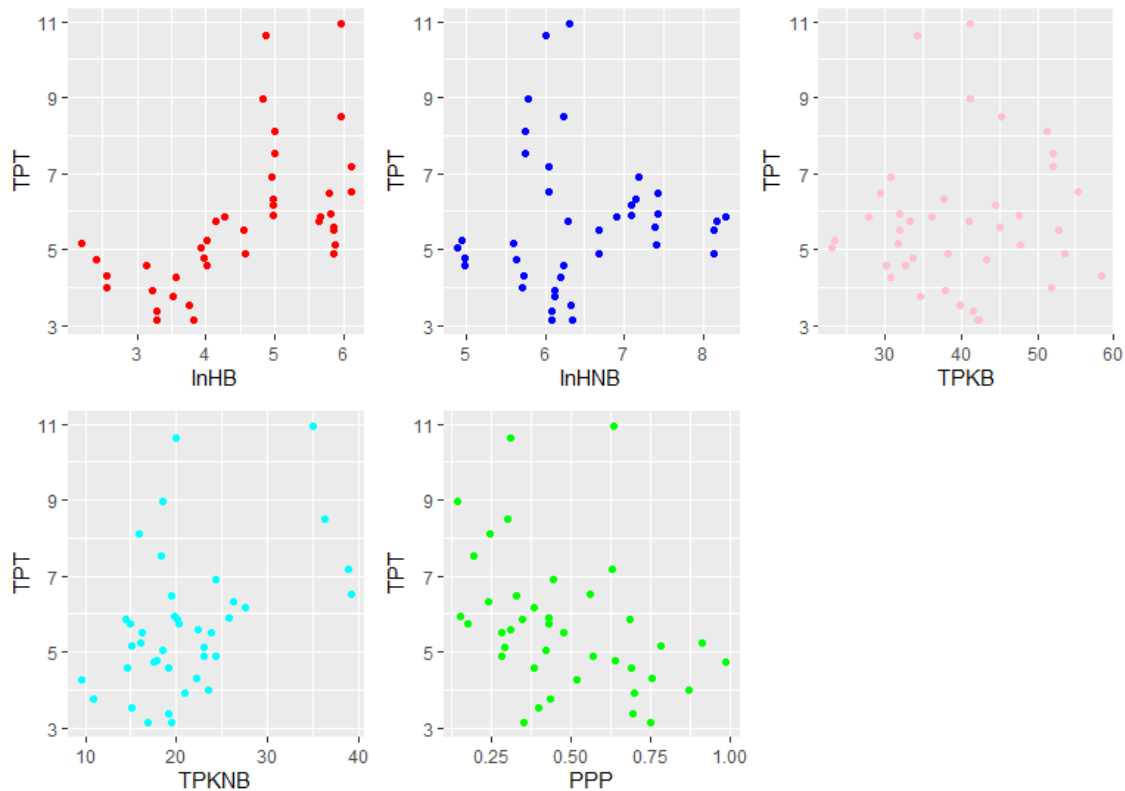
$H_0 : u_1 = u_2 = \dots = u_5$ (tidak terdapat efek individu atau model FEM)

$H_1 : \text{minimal terdapat } 1 u_i \neq 0 ; \text{ untuk } i = 1, 2, 3, 4, 5 \text{ (terdapat efek individu atau model FEM)}$

- Jika nilai p – *value* lebih kecil dari Tingkat signifikansi maka H_0 ditolak, sehingga model FEM terpilih.
- b. Uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM dengan melihat korelasi antara error model dan variabel independent
 $H_0 : E(u_{it}|X_{it}) = 0$ (tidak ada korelasi antara error dan variabel independent atau model REM)
 $H_1 : E(u_{it}|X_{it}) \neq 0$ (terdapat korelasi antara error dan variabel independent atau model FEM)
 Jika nilai p – *value* lebih kecil dari Tingkat signifikansi maka H_0 ditolak, sehingga model FEM terpilih.
 - c. Uji Breusch – Pagam Lagrange Multiplier (BP – LM) untuk mengetahui varians dari efek individu, sehingga memilih antara metode REM atau CEM
 $H_0 : \sigma_u^2 = 0$ (variens dari efek individu tidak bersifat random atau metode CEM)
 $H_1 : \sigma_u^2 \neq 0$ (variens dari efek individu bersifat random atau metode REM)
 Jika nilai p – *value* lebih kecil dari Tingkat signifikansi maka H_0 ditolak, sehingga model REM terpilih.
2. Pengujian dilanjutkan apabila model yang digunakan adalah Fixed Effects Model (FEM). Tahapan berikutnya adalah menguji struktur varians-kovarians dari residual melalui uji **Lagrange Multiplier (LM)** untuk mendeteksi adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Selain itu, dilakukan juga uji λ_{LM} guna mengetahui apakah terjadi korelasi antar unit cross-section pada struktur residual yang bersifat heteroskedastik. Jika ditemukan indikasi heteroskedastisitas serta korelasi antar unit (cross-sectional correlation) dalam error model, maka pendekatan estimasi yang paling tepat adalah **Feasible Generalized Least Square (FGLS)** dengan pembobot **Seemingly Unrelated Regression (SUR)**. Namun, jika residual hanya menunjukkan heteroskedastisitas tanpa adanya korelasi antar individu, maka metode yang dianjurkan adalah **Weighted Least Square (WLS)**. Sementara itu, apabila struktur varians-kovarians residual bersifat homoskedastik dan tidak ditemukan *cross-sectional correlation*, maka metode estimasi yang sesuai adalah **Ordinary Least Square (OLS)**.
 3. Dalam metode estimasi **Ordinary Least Square (OLS)**, terdapat sejumlah asumsi klasik yang wajib dipenuhi agar hasil estimasi valid. Asumsi-asumsi tersebut meliputi **normalitas distribusi error, homoskedastisitas (varian error konstan), tidak adanya autokorelasi, serta tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen**. Sementara itu, pada pendekatan **Fixed Effects Model** yang menggunakan metode estimasi **Weighted Least Square (WLS)** maupun **Feasible Generalized Least Square (FGLS)** dengan bobot **Seemingly Unrelated Regression (SUR)**, kedua metode tersebut dirancang untuk mengatasi permasalahan **heteroskedastisitas** dan **autokorelasi** yang mungkin muncul dalam model regresi panel.
 4. Dilakukan keberartian model secara ekonomi dan statistik (Porter & Gujarati, 2008). Keberartian model secara ekonomi menunjukkan kesesuaian hasil penelitian dengan konteks teori ekonomi. Keberartian secara statistik merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Metode pengujian yang digunakan mencakup uji F secara keseluruhan untuk melihat signifikansi bersama, uji t parsial untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen, serta adjusted R-squared untuk

mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Scatter plot variabel penjelas dan respon

Berdasarkan scatter plot gambar 1, hubungan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan variabel sektor pariwisata menunjukkan pola yang beragam. Terdapat kecenderungan hubungan positif antara jumlah tamu di hotel (baik bintang maupun non-bintang, dalam logaritma natural) dengan TPT, yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas penginapan belum tentu berdampak langsung pada penurunan pengangguran. Sebaran data yang luas juga mengindikasikan variasi antar daerah atau waktu. Sementara itu, hubungan antara tingkat penghunian kamar (baik hotel bintang maupun non-bintang) dengan TPT tampak lemah, dengan sebaran data yang acak dan tanpa pola jelas. Sebaliknya, proporsi pengeluaran sektor pariwisata menunjukkan kecenderungan hubungan negatif dengan TPT, meskipun tidak terlalu kuat, yang mengisyaratkan bahwa peningkatan belanja sektor pariwisata mungkin berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Secara umum, dua variabel yang menunjukkan kecenderungan hubungan yang lebih jelas dengan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah jumlah tamu di hotel bintang dan hotel non bintang. Sementara itu, variabel lain seperti Tingkat Penghunian Kamar dan Proporsi Pengeluaran Sektor Pariwisata

menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak konsisten secara visual. Analisis regresi panel diperlukan untuk memahami hubungan secara statistik lebih lanjut.

Analisis data panel dimulai dengan pemilihan model terbaik awalnya dengan Uji Chow diperoleh nilai p-value sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan FEM lebih baik dari CEM. Kemudian dari Uji Hausman diperoleh nilai p-value sebesar $0,0002 < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan FEM lebih baik dari REM. Dari dua pengujian tersebut dapat disimpulkan model terbaik adalah FEM. Karena model yang terpilih FEM selanjutnya melakukan pengujian struktur varians kovarians untuk menentukan metode estimasi terbaik. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai uji LM sebesar 69,8976 yang lebih besar daripada Chi-square tabel $\chi^2_{0,05;37} = 16,9190$, artinya struktur varians kovarians bersifat heteroskedastis. kemudian dilanjutkan menguji cross-sectional correlation diperoleh p-value 0,0258, maka dapat disimpulkan adanya korelasi antar cross-section sehingga metode estimasi yang digunakan adalah FGLS SUR. karena metode estimasi yang digunakan adalah FGLS SUR maka asumsi residual yang diperlukan hanya normalitas. dari uji Jarqueberra diperoleh nilai p-value 0,56 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan residual telah berdistribusi normal.

Tabel 2. Ringkasan hasil estimasi model FEM FGLS SUR

Variabel terikat	Variabel Bebas	Koefisien	t-Hitung	p-value
lnHB	TPT	-3,2108	-7.2338	0,0000*
lnHNB		2,5474	5,6826	0,0000*
TPKB		-0,0483	-24,2864	0,0000*
TPKNB		0,0347	2,5341	0,0179*
PPP		0,7906	8,6542	0,0000*
C		4,6588	3,3458	0,0405*
R^2			0,9913	
Adjusted R^2			0,9864	
F – hitung			203,7555	
p – value			0,0000	

Sumber: Data diolah eviews

Keterangan : *signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen

Dari tabel 2 diatas diperoleh Adjusted R^2 sebesar 0,9864 yang artinya bahwa sebanyak 98,64 persen keragaman TPT mampu dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam model. Sedangkan 1,36 persen sisanya dijelaskan variabel lain diluar model. Berdasarkan uji parsial variabel lnHB, lnHNB, TPKB, dan PPP memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel lnHB, lnHNB, TPKB, dan PPP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Jumlah Hotel Bintang memiliki koefisien negatif yaitu sebesar -3,2108 yang artinya setiap peningkatan jumlah hotel bintang sebesar 1 persen maka akan menurunkan rata – rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,2108 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Kemudian variabel Tingkat penghunian kamar hotel bintang memiliki koefisien negatif yaitu sebesar -0,0483 yang artinya setiap peningkatan Tingkat penghunian kamar hotel bintang sebesar 1 persen akan menurunkan rata - rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,0483 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian

Windayani dan Budhi (2017) yang menemukan hasil sebaliknya. Penambahan jumlah hotel dapat membuka lapangan pekerjaan utamanya dalam sektor pariwisata dan jasa (Windayani & Budhi, 2017). Hal ini akan memberikan dampak langsung pada turunnya angka pengangguran.

Jumlah hotel nonbintang memiliki koefisien positif yaitu sebesar 2,5474 yang artinya setiap peningkatan jumlah hotel nonbintang sebesar 1 persen maka akan meningkatkan rata - rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,5474 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Hotel non-bintang umumnya beroperasi dalam skala kecil dan tidak memiliki standar ketenagakerjaan formal. Banyak dari hotel ini mempekerjakan pekerja secara informal tanpa kontrak kerja, jaminan sosial, atau kepastian upah yang layak. Pekerja informal ini tidak tercatat dalam statistik pekerjaan formal, sehingga mereka tetap diklasifikasikan sebagai penganggur atau setengah penganggur (International Labour Organization (ILO), 2018). Hal ini berdampak pada peningkatan angka pengangguran terbuka meskipun terjadi aktivitas ekonomi. Pekerjaan informal cenderung tidak tercatat dalam statistik tenaga kerja formal, menyebabkan potensi bias dalam pengukuran pengangguran terbuka” (International Labour Organization (ILO), 2018).

Tingkat penghunian kamar hotel nonbintang memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,0347 yang artinya setiap peningkatan Tingkat penghunian kamar hotel bintang sebesar 1 persen akan meningkatkan rata - rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,0347 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. Peningkatan TPK hotel non-bintang biasanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu (destinasi wisata populer). Hal ini dapat menarik migrasi tenaga kerja ke lokasi tersebut, menciptakan kelebihan suplai tenaga kerja yang tidak terserap secara optimal. Akibatnya, angka pengangguran terbuka meningkat karena adanya mismatch antara pencari kerja dan kapasitas serapan lapangan kerja lokal (Todaro, 1980). Kemudian okupansi hotel non-bintang sangat bergantung pada musim wisata (Peak Season). Ketika TPK tinggi hanya dalam jangka pendek, maka hotel cenderung tidak merekrut karyawan tetap, menyiasati dengan kontrak pendek atau *outsourcing*. Sehingga, lonjakan TPK tidak menciptakan pekerjaan berkelanjutan, dan tidak berdampak menurunkan pengangguran secara struktural (Dwyer et al., 2004).

Proporsi pengeluaran pemerintah sektor pariwisata memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,7906 yang artinya setiap peningkatan 1 persen proporsi pengeluaran pemerintah untuk pariwisata akan meningkatkan rata – rata tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,7906 persen. Menurut Holloway dan Humpreys (2012) seringkali pengeluaran pemerintah untuk pariwisata kurang efektif akibat kurangnya koordinasi dan perencanaan matang. Infrastruktur yang dibangun dan fasilitas pendukung seringkali dibangun tanpa adanya pemetaan kebutuhan pasar yang tepat, sehingga investasi yang besar tidak diikuti dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan. Hal ini menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang terbatas dan tidak optimal. Selain itu Holloway dan Humpreys (2012) juga menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan waktu yang panjang sehingga dampak penurunan pengangguran sulit terlihat dalam jangka pendek.

KESIMPULAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penurunan angka pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa secara visual variabel jumlah tamu hotel baik di hotel bintang maupun non bintang menunjukkan hubungan yang kuat dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sedangkan variabel Tingkat Penghunian Kamar serta Proporsi

Pengeluaran Sektor pariwisata sebaliknya. Berdasarkan uji yang dilakukan, model regresi data panel yang dipilih adalah metode Fixed Effect Model (FEM) karena terdapat efek individu pada suku *error*. Selain itu, hasil pemodelan juga menunjukkan bahwa jumlah hunian hotel bintang dan non bintang, Tingkat Penghunian Kamar hotel bintang dan non bintang, serta proporsi pengeluaran sektor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di destinasi pariwisata nasional. Variabel jumlah hunian hotel bintang dan Tingkat Penghunian Kamar hotel bintang berpengaruh negatif terhadap TPT. Sedangkan variabel jumlah hunian hotel non bintang, Tingkat Penghunian Kamar Non Bintang, dan proporsi pengeluaran sektor pariwisata berpengaruh negatif terhadap TPT. Pemerintah diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat lokal untuk bekerja di sektor pariwisata, memberikan jaminan status ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pariwisata, serta melakukan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang pariwisata dengan lebih baik. Dengan demikian, optimalisasi sektor pariwisata bukan hanya soal menarik wisatawan, tetapi juga membuka peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, B. H. (2005). *Economic Analysis of Panel Data*. John Wiley & Sons Inc.
- Clarke, J. R., & Middleton, V. T. C. (2001). *Marketing in Travel and Tourism*. Butterworth-Heinemann.
- Dwyer, L., Forsyth, P., & Spurr, R. (2004). Evaluating tourism's economic effects: new and old approaches. *Tourism Management*, 25(3), 307–317. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(03\)00131-6](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0261-5177(03)00131-6)
- Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2017). *Tourism: Principles and Practice*. Pearson Education.
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610–623. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>
- Holloway, J. C., & Humphreys, C. (2012). *The Business of Tourism*. Pearson Education.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Women and Men in The Informal Economy: A Statistical Picture*.
- Kemenparekraf/Baparekraf. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024*. https://api2.kemenparekraf.go.id/storage/app/resources/RENSTRA_opt_b6d790a042.pdf
- Porter, D. C., & Gujarati, D. N. (2008). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Sinclair, M. T., & Stabler, M. (1997). *The Economics of Tourism (1st ed.)*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203195437>
- Suwena, I. K., & Widyatmaja, I. G. N. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan.
- Tavallae, S., Asadi, A., Abya, H., & Ebrahimi, M. (2014). Tourism planning: an integrated and sustainable development approach. *Management Science Letters*, 4, 2495–2502. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2014.11.008>
- Thorne, E. M. F. (2025). Review of Input-Output and Regional Economics. *The Economic Journal*, 83(332), 1300–1302. <https://doi.org/10.2307/2230867>
- Todaro, M. (1980). Internal Migration in Developing Countries: A Survey. In *Population and Economic*

- Change in Developing Countries* (pp. 361–402). University of Chicago Press.
<http://www.nber.org/chapters/c9668>
- Windayani, I. A. R. S., & Budhi, M. K. S. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 195–224.
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. The MIT Press.
<http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhcfr>
- World Tourism Organization. (2019). *International Tourism Highlights, 2019 Edition*. World Tourism Organization. <https://doi.org/10.18111/9789284421152>
- Yang, L. (2011). Ethnic tourism and cultural representation. *Annals of Tourism Research*, 38(2), 561–585.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.annals.2010.10.009>